

POLITIC TIMING : ANALISIS POLITIK KEBIJAKAN SOSIAL (BLT DAN BPJS) PEMERINTAHAN ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2004-2014

Ezra Christian

Email : vevo@hotmail.co.id

ABSTRACT

Social policy is one of the purpose of the national development which aims to create social welfare. Political consideration can not be separated from policy even social policy because the policy establishment and implementation was made by politic actors who have interests in policy so there are many bargains happend in social policy.

BLT and BPJS are quite popular social policies that were issued by the government of Susilo Bambang Yudhoyono which aims to compensate fuel price and ensure public health. Aspects and political meanings are inseparable from those two programs including the political timing. This research was using descriptive qualitative method with in depth interview and document as the data collection.

In the implementation and establishment of BLT and BPJS researcher found one of the political aspect in the policy was the mobilization of voters and the use of BLT and BPJS to face the election in 2009 and 2014 as the political gain of the government of SBY. Researcher also found behavior and responses from SBY in responding the problems and pro contra from BLT and BPJS is to maximize political gain. The researcher also explained the received political impacts of BLT and BPJS in the government of SBY

Keywords: Politic, Social Policy, Timing, BPJS, BLT, Mass Mobilization

ABSTRAK

Kebijakan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. pertimbangan politik tidak dapat terlepas dari kebijakan bahkan sebuah kebijakan sosial karena dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut di buat oleh para aktor aktor politik yang mempunyai kepentingan di dalam kebijakan tersebut sehingga banyak tawar menawar yang terjadi di dalam kebijakan tersebut

BLT dan BPJS merupakan kebijakan sosial yang cukup populis yang di keluarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dan menjamin kesehatan masyarakat. Aspek dan makna politik tidak terlepas dari kedua program tersebut termasuk di dalam *Timing* politik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen

Dalam pelaksanaan maupun pembuatan BLT dan BPJS peneliti menemukan aspek politik dari kebijakan tersebut salah satunya tentang mobilisasi pemilih dan pemanfaatan BLT dan BPJS untuk menghadapi pemilu 2009 dan 2014 untuk menjadi keuntungan politik pemerintahan SBY. Peneliti juga menemukan perilaku dan

respons dari SBY dalam menanggapi permasalahan dan pro kontra dari BLT dan BPJS untuk memaksimalkan keuntungan politik yang di dapat. Serta juga peneliti menjelaskan dampak politik yang di terima oleh pemerintahan SBY dan BLT dan BPJS tersebut

Kata Kunci : *Politik, Kebijakan Sosial, Timing, BPJS, BLT, Mobilisasi massa.*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikatnya manusia untuk mengatur apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Politik sendiri dalam pandangan klasik berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dibuat selalu sejalan dengan pertimbangan politik. Setiap langkah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan senantiasa mengandung aspek politis di dalamnya. Kebijakan sosial bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai. BPJS Kesehatan dan BLT merupakan beberapa kebijakan sosial yang di keluarkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi permasalahan sosial dalam pemerintahannya khususnya masalah jaminan kesehatan masyarakat dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Kebijakan sosial yang berupa filantropi seperti BLT dan BPJS Kesehatan juga memiliki tujuan politis. Baik dari perencanaannya, pemanfaatannya, maupun penempatan waktu kebijakan dan sebagainya, kebijakan memiliki maksud dan tujuan politik di dalamnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan kepada pembuat kebijakan tersebut dan untuk mencapai tujuan politik dari pembuat kebijakan

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan diangkat dan di teliti akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Politik Timing* kebijakan sosial (BLT dan BPJS Kesehatan) pada era pemerintahan SBY tahun 2004-2014?

Kajian Teori

Politik Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan. Setiap masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang dicapai dengan usaha bersama memerlukan rencana-rencana yang dituangkan dalam kebijakan oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah². Definisi mengenai kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis (2005:3), kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or not to do*" yang berarti kebijakan publik adalah "apa saja yang dipilih oleh pemerintah

¹Surbakti, Ramlan, 2010, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta, Grasindo hlm 3

²Budiarjo, Miriam, 2008, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta, Gramedia, hlm 20

untuk dilakukan atau tidak dilakukan”³ Tidak terlepasnya aspek politik dalam sebuah kebijakan disebabkan banyaknya tawar menawar kepentingan-kepentingan dari para pemegang kepentingan. Aktifitas tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan⁴. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual⁵.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah dalam merespon isu-isu yang bersifat public, yakni mengatasi masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial sendiri adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program dan pelayan sosial. Kebijakan sendiri memiliki fungsi preventif (pencegahan) untuk mecegah masalah sosial, fungsi kuratif (penyembuhan) untuk mengatasi masalah sosial dan fungsi pengembangan (*developmental*) untuk mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Bentuk dari kebijakan sosial tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja, kebijakan sosial juga dapat berbentuk program-program pelayanan sosial dan sistem perpajakan sebagai instrumen kebijakan⁶. Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan .beberapa pelayanan sosial adalah jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.

Politic Timing

Penempatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan cara-cara untuk mempengaruhi proses politik untuk mencapai tujuan politik dari pemerintah melalui kekuasaan yang dimiliki dalam menempatkan waktu kebijakan. Penempatan waktu dalam suatu peristiwa politik (political event) tidak di tetapkan secara acak (non-random) tetapi dipengaruhi oleh para politisi/pemegang kepentingan. Para pemegang kepentingan atau para politisi mempengaruhi waktu kebijakan untuk memaksimalkan keuntungan politik yang di dapat dan meminimalisir biaya dan resiko politik. Politisi menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menempatkan waktu dari suatu peristiwa politik untuk meningkatkan perhatian publik terhadap dampak positif tindakanya untuk menarik dukungan dari masyarakat dan mengurangi perhatian publik terhadap dampak negatif dari tindakanya yang dapat meningkatkan resiko politik yang diterima⁷.

³Suharto, Edi, *Op.cit*

⁴Dunn, William N, 2000, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”,Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 22

⁵Subarsono,AD,*Op.Cit*, Hal 8

⁶ Suharto, Edi, *Op.Cit* hlm 11

⁷ Gibson,John 1999, “Political Timing (A Theory of Politicians’ Time Events)”*Journal of Theoretical Politics* 11(4):471-496, London, Sage Publications hlm 471

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Untuk penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian yaitu bersifat purposif, yang diantaranya adalah:

1. DPR-RI
2. Peneliti Kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Gambaran Umum

Bantuan Langsung Tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brasil ke-35⁸. Bolsa Familia memiliki dua hasil penting: membantu mengurangi kemiskinan saat ini, dan membuat keluarga berinvestasi pada anak-anak mereka, sehingga memutus siklus transmisi antargenerasi dan mengurangi kemiskinan di masa depan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana yaitu sebagai penunjang konsumsi bagi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2005. BLT diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung dalam empat kali cicilan lebih dari satu tahun. BLT ditargetkan untuk rumah tangga miskin sebagai yang paling tidak beruntung adanya pengurangan subsidi dan paling berisiko mendapatkan dampak negatif pada konsumsi dari kenaikan harga.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan Peserta. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero).

Pembahasan

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Keadaan perekonomian di Indonesia yang sedang bergejolak akibat naiknya harga BBM di pasar internasional membutuhkan solusi yang dapat memperbaiki

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai diakses pada tanggal 9 Juni 2017

keadaan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Kondisi tersebut mendukung BLT sebagai salah satu cara untuk mengatasi keadaan perekonomian Indonesia yang sedang bergejolak. Pada tahun 2008, suhu politik terhadap program BLT cukup tinggi terjadi. Ketegangan politik yang terjadi di politik lokal pada tahun 2008 berkurang dan kondisi politik pusat dipusat mulai tegang karena berdekatan dengan pemilu 2009. Banyaknya kegiatan politik dari para calon-calon untuk mencari dukungan atau suara masyarakat menjadikan BLT rentan untuk dijadikan sebagai alat politik untuk beberapa pihak

Pendistribusian BLT pada tahun 2009 juga memiliki muatan politik di dalamnya. Pemerintah menggunakan data rakyat miskin tahun 2005 untuk mendistribusikan BLT tahun 2009. Pembaruan Pendataan Sosial Ekonomi penduduk tahun 2005 (PSE05) telah dilakukan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08). Pengambilan keputusan untuk menggunakan data tahun 2005 terlihat sangat politis karena penggunaan data PPLS08 dapat menimbulkan konflik di dalam penyaluran BLT karena terdapat 1.6 juta rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan lagi. Megawati menginstruksikan bupati/walikota dan gubernur PDIP untuk menolak pelaksanaan BLT di daerahnya. Terhitung minimal ada 27 bupati/walikota dan gubernur PDIP yang menyatakan penolakan secara terbuka. Jumlah 27 kepala daerah yang menolak BLT dihasilkan dari review media, baik media cetak maupun media online⁹

Respon positif terhadap BLT dari masyarakat yang meningkatkan popularitas SBY digunakan untuk menyerang Megawati yang sebelumnya menolak BLT. Penurunan popularitas Megawati semakin menurun setelah kritiknya terhadap BLT yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2009 dimana popularitas SBY sedang naik. Presiden SBY dalam pernyataannya dalam kampanyenya memberikan kritik secara tidak langsung terhadap inkonsistensi sikap dari Megawati dan PDIP terhadap program BLT. SBY secara tidak langsung juga menyampaikan bahwa perubahan sikap dari Megawati dan PDIP terhadap PDIP tersebut berkaitan dengan blundernya pernyataan dari Megawati yang menyebabkan turunya popularitas Megawati dan PDIP karena melihat pemilu legislative dan pilpres semakin dekat resposisi tersebut dilakukan oleh Megawati untuk mengembalikan dukungan

Keberhasilan dari BLT tersebut sangat berpengaruh bagi dukungan partai Demokrat dan SBY. Pemberitaan dari media dan orasi yang dilakukan pada saat kampanye meningkatkan arus dukungan terhadap SBY. Klaim terhadap program-program yang berhasil dapat menjadi sarana sebagai alat untuk memobilisasi pemilih Kemenangan Demokrat sebagai partai baru sangat berkaitan dengan keberhasilan dari program BLT. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 5-8 Maret. Dalam hasil jajak pendapat tersebut 69,4 persen responden setuju terhadap program BLT. Pendapat responden tentang partai mana yang mendorong penerapan BLT, 54,3 persen menjawab partai demokrat, PDIP hanya dinilai sebesar 8,1 persen dan Partai Golkar sebesar 7,8 persen¹⁰. Masyarakat setuju dan menerima program BLT yang dijalankan SBY dan melihat bahwa peran SBY dan partai Demokrat sangat berpengaruh dalam mendukung berjalannya program SBY.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁹ Sumarto, Mulyadi, *Op Cit* hlm 91

¹⁰<http://bola.kompas.com/read/2012/03/11/16250472/lsi.blt.untungkan.demokrat.rugikan.partai.lain>
diakses pada 8 September 2017

Pada program BLT, terlihat bahwa Presiden SBY dan Partai Demokrat sangat gencar untuk mendukung pelaksanaan program BLT. Pada kebijakan BPJS, sikap yang berbeda di tunjukan oleh Presiden SBY. Pemerintah SBY sangat lambat dan mengulur waktu dalam pembuatan dan pelaksanaan BPJS sehingga sikap SBY terlihat menghambat pembentukan BPJS. Tetapi setelah mendekati waktu pemilu 2014 terdapat perubahan sikap dari SBY. Perubahan perilaku yang dilakukan SBY dikarenakan adanya keuntungan politik yang dia lihat di dalam BPJS. Dalam kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS pemerintah SBY melihat adanya keuntungan politik bisa didapat dari kebijakan tersebut. Lambatnya respon pemerintah dilakukan bukan tanpa alasan dilakukan oleh pemerintah SBY. Kekuasaan yang dimiliki sebagai kepala negara digunakan oleh SBY untuk mengendalikan BPJS agar dapat menjadi sebuah keuntungan politik bagi dirinya. SBY menggantung pelaksanaan BPJS untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan dari BPJS dengan pemilu 2014 agar dapat dikemas oleh SBY sebagai kepentingan politiknya untuk mendapatkan dukungan bagi partai demokrat pada pemilu 2014.

BPJS sendiri tidak bisa lepas dari kepentingan politik. SBY menggunakan BPJS sebagai alat kampanye terselubungnya untuk menarik perhatian masyarakat miskin. Keuntungan politik yang besar dapat diambil dari rakyat miskin kurang kritis sehingga ketika kampanye terselubung dilakukan dengan memanfaatkan BPJS, rakyat miskin yang diuntungkan dengan adanya akan mendukung pihak yang melakukan kampanye terselubung. Salah satu kampanye terselubung yang dilakukan untuk menarik perhatian tersebut SBY menggunakan Surat Edaran Direksi BPJS Kesehatan Nomor 0055 tahun 2014 tentang Pengiriman Surat Pelanggan kepada peserta JKN-PBI. Surat edaran tersebut merupakan sosialisasi BPJS kepada para peserta PBI yang dimana merupakan masyarakat miskin yang menerima bantuan dari pemerintah untuk jaminan kesehatan. Dalam surat edaran tersebut peran SBY sangat ditekankan dalam mendukung terselenggaranya BPJS yang membantu 86,4 juta rakyat miskin atau peserta PBI. Penekanan peran SBY tersebut merupakan salah satu kampanye terselubung dan penyalahgunaan surat edaran yang seharusnya merupakan sosialisasi BPJS. Selain penyalahgunaan surat edaran yang bernuansa politis. SBY juga melakukan klaim terhadap BPJS sebagai program "SBY Care", klaim ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa SBY berperan besar dalam pembentukan dan penyelenggaraan BPJS. Sehari setelah peresmian Program BPJS Kesehatan 2 Januari 2014, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan pendapat bahwa BPJS adalah SBY care dan ia membandingkan dengan Program Obama Care di Amerika Serikat.

Klaim dari BPJS oleh yang digunakan sebagai alat politik untuk memobilisasi massa berhasil meningkatkan arus dukungan terhadap partai Demokrat dan meloloskan partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2014. Keberhasilan naiknya elektabilitas Partai Demokrat yang sebelumnya menurut hasil beberapa survey dibawah 10 persen dikarenakan berhasilnya klaim BPJS yang dilakukan oleh SBY. Kondisi rusaknya mesin politik Partai Demokrat akibat banyaknya faksi di dalam internal partai ditambah banyak politisi dari partai Demokrat yang terkena kasus korupsi, sangat sulit jika tidak menggunakan klaim BPJS untuk dapat memperoleh dukungan yang cukup besar dari masyarakat. Perolehan suara dan kursi yang diterima oleh partai Demokrat yang menempati posisi ke 4 terbanyak merupakan pencapaian yang dapat dibilang sukses melihat kondisi internal partai sedang bergejolak. Keberhasilan naiknya elektabilitas Partai Demokrat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa program kebijakan BPJS di respon positif oleh masyarakat miskin. Presiden SBY berhasil mempengaruhi masyarakat miskin untuk mendukung Partai Demokrat

dengan Klaim BPJSnya yang menunjukkan bahwa BPJS merupakan program yang pro rakyat dan didukung oleh partai Demokrat

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Kebijakan sosial seperti BLT dan BPJS yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan untuk menarik dukungan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya keuntungan politik

Penggunaan kebijakan sosial sebagai alat politik yang terjadi sangat berpengaruh dengan *timing* politik untuk mendapatkan keuntungan politik secara maksimal yang dapat dilihat dari *timing* dan perilaku pemerintahan SBY dalam menggunakan kebijakan sosial yaitu BLT dan BPJS yang memperhatikan respons dan *timing* dalam menanggapi permasalahan yang ada dari kebijakan tersebut

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2016). "Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)". Jakarta: Rajawali Pers
- Andita. Wenny. (2016). "Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur". Universitas Hassanudin
- Budiarjo, Miriam. (2008). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia
- Dr. Basrowi, M.Pd. Dr. Suwandi, M.Si. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta.
- Dr. Lexy J. Moleong. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dunn, William N. (2000). "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gibson, John (1999). "Political Timing (A Theory of Politicians' Time Events)" London: Sage Publications
- Haryatmoko. (2016). "Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan". Jakarta: Rajawali Pers
- Iqbal, Hasbi. (2008). "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus". Universitas Diponegoro
- Michael Quinn Patton. (2009). "Metode Evaluasi Kualitatif. Bab 5". Yogyakarta.
- Moelong Lexy. (2007). "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)". Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musramadoni, (2014). "Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
- Prof. Dr. Nyoman Dantes. (2012). "Metode Penelitian". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: ALFABETA.

- Simatupang, Pandjar, “Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ART01-1a.pdf> diakses pada tanggal 9 Februari 2017
- Subarsono, AG. (2013). “Analisis Kebijakan Publik : Konsep , Teori dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi, (2011). “Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna, (2014). “Metodologi Penelitian”. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sumarto, Mulyadi. (2014). “Perlindungan Sosial dan Klientisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Surbakti, Ramlan (2010). “Memahami Ilmu Politik”. Jakarta: Grasindo
- Sutaryo dan kawan kawan (2015). “Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) (Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres Pancasila VII). Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM
- Syamsu Alam, A. (2012). “Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.1 No. 3 Juni 2012
- Winarno, Budi (2012). “Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus)”. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service,
- Winarno, Budi. (2016) “Kebijakan Publik Era Globalisasi”. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service,